Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2023



LKjIP

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dibuat sebagai laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan merupakan laporan tahun terakhir dari pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2018–2023. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan pencapaian kinerja secara menyeluruh, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), termasuk kepada pihak-pihak yang memberikan masukan, koreksi guna penyempurnaannya. Demikian halnya dengan segala kekurang sempurnaan yang terdapat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 8 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

Paraf Hierarkis

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Dinas / Badan		8/1-24
2.	Kasubbag		8/1 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM/LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu peyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka integrasi perwujudan Misi Kabupaten Nganjuk.

Laporan Kineja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menggerakkan sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Sistem AKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2015). Berdasarkan Inpres No: 7/1999, instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. Inpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi, Kebijakan/Program dan indikator kinerja), mengukur

keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit organisasi bersifat khusus Kabupaten Nganjuk.

C. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

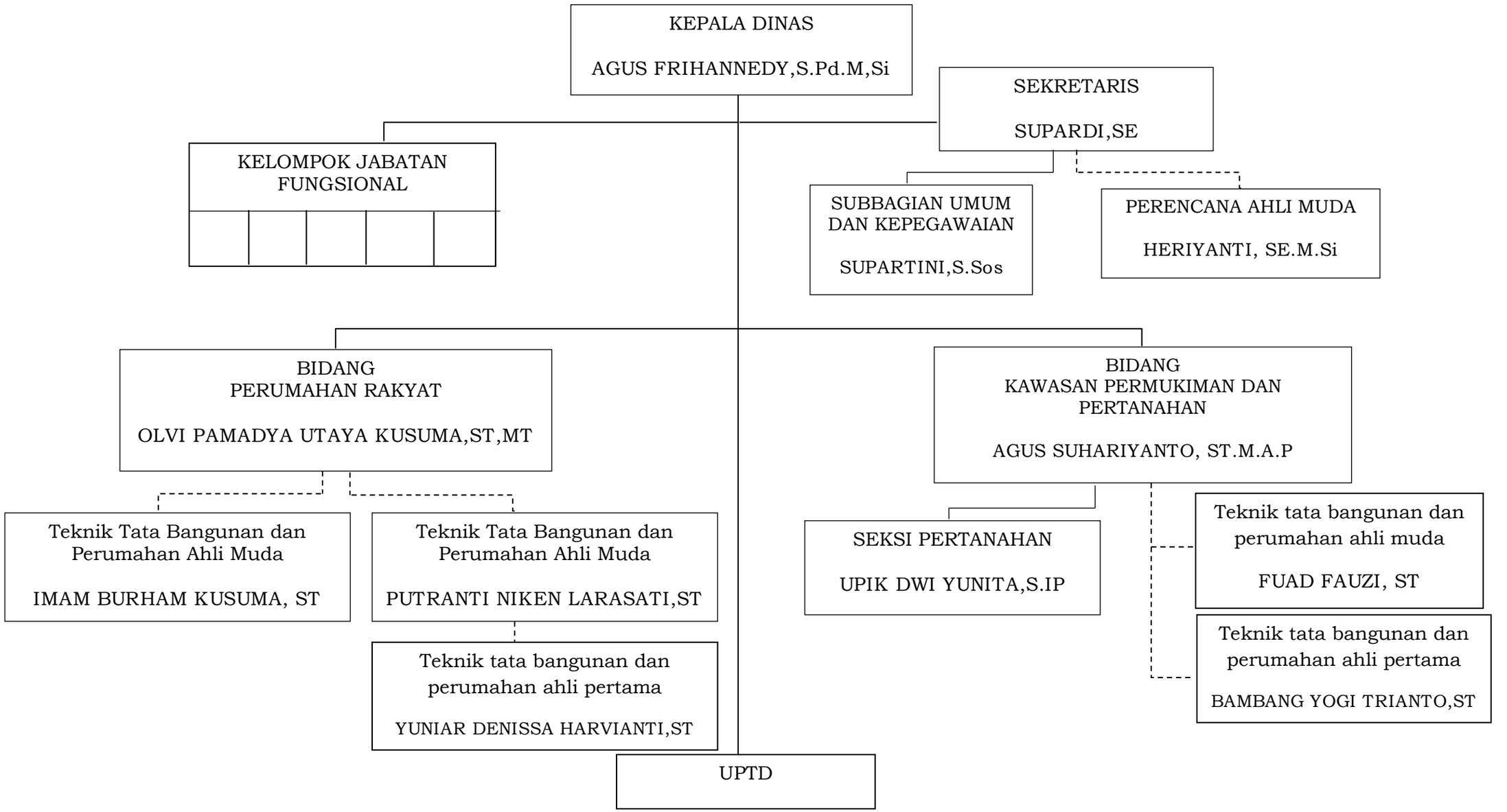
1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi :
    1) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
d. Bidang Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
    1) Seksi Pertanahan.
    2) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari susunan organisasi di atas, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat di jabarkan pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK



2. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

3. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
c. Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

1) Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d) Pembinaan aparatur;
e) Pengelolaan urusan kepegawaian;
f) Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
h) Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

- **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

  Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1) Melaksanakan urusan persuratan;
  2) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  3) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
  4) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
  5) Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
  6) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat menyelenggaarakan fungsi:

a) Penyusunan dan penetapan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) di bidang perumahan rakyat;
b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat yang meliputi penetapan kebijakan strategis, pengelolaan dan pemeliharaan perumahan rakyat.
c) Perencanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
d) Pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
e) Pembangunan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
f) Pendistribusian dan serah terima korban bencana atau relokasi program kabupaten;
g) Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
h) Penerbitan izin pengembangan dan pembangunan perumahan
i) Penerbitan Sertifikat Izin Kepemilikan Gedung (SKGB);
j) Peningkatan Prasarana, Sarana Utilias (PSU) umum;
k) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan rakyat;
l) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
m) Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU umum tingkat kemampuan kecil;
n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang permukiman dan pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
c) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

d) Penataan dan peningkatan kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
e) Pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) kabupaten dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
f) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
g) Penyelesaian masalah tanah kosong, pengelolaan izin membuka tanah dan penatagunaan tanah;
h) Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
i) Penerbitan izin membuka tanah;
j) Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu kabupaten; dan
k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

- **Seksi Pertanahan**

  Seksi Pertanahan mempunyai tugas;

  1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin lokasi dalam rangka penanaman moda dan kemudahan berusaha;
  2) Melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah;
  3) Melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah;
  4) Melaksanakan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah;
  5) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
  6) Melaksanakan inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah;
  7) Melaksanakan inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
  8) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) kabupaten;
  9) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
  10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  11) Melaksanakan inventarisasi tanah kosong;

12) Melaksanakan pemanfaatan tanah kosong;
13) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
14) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
15) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
16) Melaksanakan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten;
17) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten;
18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja adalah tersedianya SDM, baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan ANJAB ABK sebagaimana Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/527/K/411.013/2022 tentang Analisis Jabatan dan Anaalisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk kebutuhan SDM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman adalah 63 orang dengan Rincian

1). Jabatan Tinggi Pratama	= 1 orang
2). Jabatan Administratur Eselon III	= 3 orang
3). Jabatan Administratur Eselon IV	= 2 orang
4). Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	= 6 orang
5). Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pratama	= 2 orang
6). Jabatan Fungsional Umum	= 49 orang

Adapun kondisi existing SDM Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.1

Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah/Kecamatan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	THL
1	Dinas PRKPP	6	6	19	8
Total Pegawai		**39**			

Rincian berdasarkan Jenis Jabatan adalah sebagai berikut :

Eselon II = 1 orang

Eselon IIIA = 1 orang

Eselon IIIB = 2 orang

Eselon IVA = 1 orang

Eselon IVB = 1 orang

JFT Ahli Muda = 4 orang

JFT Ahli Pratama = 2 orang

Jabatan Fungsional Umum = 19 orang

Tenaga Non ASN = 8 orang

Tabel 1.1.2

Data ASN Menurut Golongan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Golongan I	Orang	3
2. Golongan II	Orang	9
3. Golongan III	Orang	15
4. Golongan IV	Orang	4
5. Non ASN	Orang	8
Jumlah	**Orang**	**39**

Tabel 1.1.3

Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah/Kecamatan	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1	Dinas PRKPP	2	1	8	2	22	4
Total Pegawai		**39**					

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk mempunyai latar belakang pendidikan bidang tehnik (Tehnik Sipil dan tehnik Lingkungan). Dengan kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, diharapkan bisa menggerakan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka mencukupi kekurangan jumlah SDM, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kabupaten Nganjuk merekrut pegawai tidak tetap (Tenaga Harian Lepas/THL) sesuai dengan kecukupan anggaran.

b. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris dinas sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.4

SARANA DAN PRASARANA KERJA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Mobil Dinas Jabatan	Unit	1
2	Mobil Dinas Lapangan	Unit	3
3	Sepeda motor	Unit	11
4	Tanah	Bidang	2
5	Bangunan Gedung	Unit	2

D. ISU ISU STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan urusannya, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1.5

Data Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Perumahan dan Permukiman	a	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	1	Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman
				2	Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan
				3	Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
				4	Lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya kunci perumahan
				5	Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
				6	Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
		b	Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh	1	Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
				2	Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
				3	Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan
				4	Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	*2*	*3*		*4*	
		c	Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dikawasan tertinggal, dan dikawasan pinggiran hutan di perdesaan.		
		d	Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba		
		e	Kurangnya penyiapan dan penyediaan lahan untuk perumahan yg dikelola oleh pemerintah daerah		
		f	Masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung, terutama di daerah rawan Bencana yang berpenghuni		

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

a. Terbatasnya Alokasi Pagu Anggaran;

b. Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman;

c. Kurangnya sinkronisasi data secara terpadu melalui jaringan IT;

d. Kurangnya aturan yang mendukung pengendalian tata ruang dan asset;

Dari akar masalah dimaksud kemudian ditentukan **isu isu strategis** yang akan ditangani yaitu :

1. Belum optimalnya penanganan kawasan rawan kumuh yang ada di Kabupaten Nganjuk;

2. Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;
3. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalampembangunan perumahan dan permukiman padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat baik pribadi maupun bersama-sama. Begitu juga badan usaha yang masih belum maksimal dalam penyediaan perumahan.
6. Kerusakan lingkungan hidup

   Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan dan pedesaan yang tidak terkendali.Misalnya, penebangan hutan secara liar menyebabkan sulitnya memperoleh sumber air bersih.
7. Masih adanya masalah pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi;
8. Pelaksanaan proses legalisasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang tertunda disebabkan permintaan masyarakat terhadap ganti kerugian tanah yang belum sesuai dengan harga pasar;
9. Langkah-langkah Penanganan penyelesaian sengketa tanah dalam proses pengkajian, koordinasi serta sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan pertanahan belum berjalan secara efisien dan efektif.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum/Latar Belakang;
B. Landasan Hukum;
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
D. Isu-isu Strategis (Strategic Issued); dan
E. Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja;
B. Perjanjian Kinerja Pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Penutup

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR/RINGKASAN RENCANA STRATEGIS/RENCANA KERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan RPJMD Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk.

a. Visi

Sesuai dengan visi misi Kabupaten Nganjuk yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, visi kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat”

Pernyataan visi tersebut dicapai dengan mengerahkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Nganjuk dengan motto:

“(Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)”

b. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah, ada 6 (enam) misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran perangkat daerah yaitu :

1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
2) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3) Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;

4) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna;
5) Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata;
6) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Berdasakan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

"Insfrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Perlindungan dari Bencana"

c. Tujuan

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 adalah **"Meningkatkan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman"**

d. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan adalah :

1) Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Yang Layak Huni;
2) Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan.

e. Strategi

1). Mengembangkan perumahan yang layak Huni
2). Menindaklanjuti permasalahan pertanahan asset daerah

f. Arah Kebijakan

1). Tersedianya perumahan dan permukiman layak huni dan terjangkau;
2). Perumahan yang di dukung Prasarana, Saarana dan Utilitas yang baik;
3). Inventarisasi aset aset tanah Pemerintah Daerah
4). Sertifikasi asset asset tanah Pemerintah Daerah.

Tabel 2.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Araah Kebijakan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	1. Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	1. Mengembangkan perumahan yang layak huni	1. Tersedianya Perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau
			2. Perumahan yang didukung PSU yang baik
	2. Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	1. Menidaklanjuti permasalahan pertanahan asset pemerintah daerah	1. Iventarisasi asset-aset pemerintah daerah
			2. Sertifikasi tanah-tanah asset pemerintah daerah

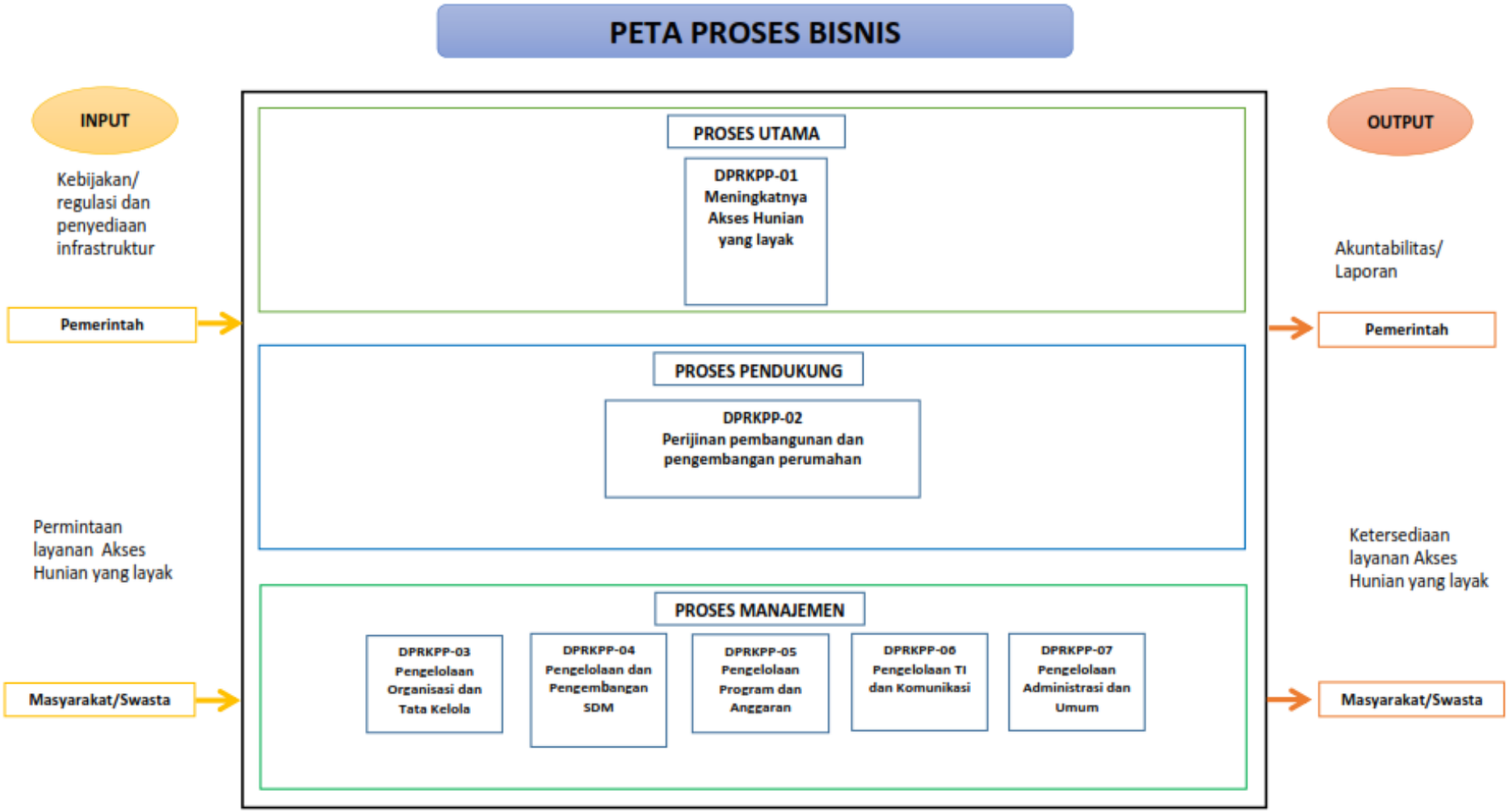
Gambar 2.1

Keterkaitan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Nganjuk dengan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



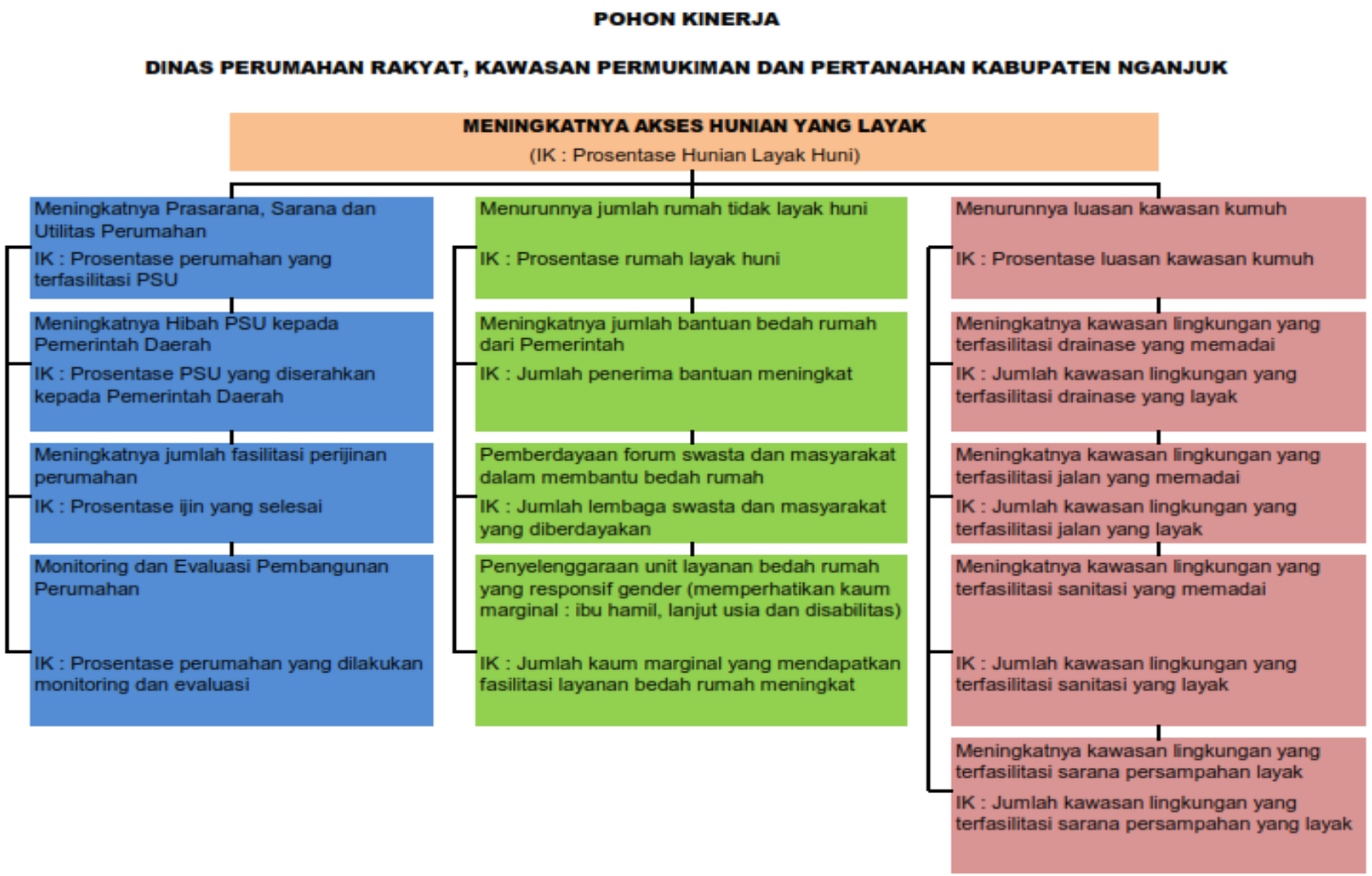
Gambar 2.2.

Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023



Gambar 2.3

Pohon Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023



Berikut ini beberapa program unggulan yang sudah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan visi dan misi Kabupaten Nganjuk yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program
5. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
8. Program Penatagunaan Tanah

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran.

B. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	58,5
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	93,21
2	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100

No	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.522.262.146	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	1.589.139.500	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	6.108.500.000	APBD
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.508.833.790	APBD
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2.134.000.000	APBD
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	100.000.000	APBD
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	25.000.000	APBD
8	Program Penatagunaan Tanah	330.000.000	APBD
T O T A L		**22.317.735.436**	**APBD**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja berikut :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tujuan **Meningkatkan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman** dengan sasaran Strategi ada dua yaitu **1. Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak Huni** dengan **capaian kinerja 119,47%** dan **2. Meningkatnya penyelesaian permasalahan pertanahan** dengan **capaian kinerja 100%,** yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan didukung alokasi anggaran pada Perubahan-APBD sebesar Rp. 32.280420.241,- dengan realisasi Rp. 29.694.040.472,- atau sebesar 91,99 % meliputi 8 program dan 19 kegiatan serta 46 sub kegiatan.

Berdasarkan capaian program, kegiatan, sasaran strategis dan indicator kinerja serta alokasi anggaran pada akhir Tahun 2023 rata-rata capain kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk diatas 90% dengan kategori **Sangat Tinggi**

Realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 terhadap target RPJMD Kabupaten Nganjuk dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman		Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	83,9	85,27	101,63%
2		Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	58,5	69,89	119,47
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	93,21	85,91	92,17
3		Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100	100	100

Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja tujuan/sasaran. Adapun Realisasi Kinerja secara rinci Indikator kinerja tujuan/sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi **indikator tujuan persentase peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman** terealisasi sebesar 85,27% dari target yang telah ditetapkan sebesar 83,90% dengan tingkat capaian sebesar 101,63%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu penjumlahan dari persentase 3 (tiga) indikator sasaran kemudian dibagi 3 (tiga) dikali dengan 100%.
2. Realisasi **indikator sasaran persentase pengurangan luasan kawasan kumuh** terealisasi sebesar 69,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 58,5% dengan tingkat capaian sebesar 119,47%.

Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu Jumlah luasan kawasan kumuh yang ditangani di kabupaten (Ha) dibagi dengan jumlah luasan total kawasan kumuh yang ditetapkan di kabupaten (Ha) dikali dengan 100%.

Realisasi Capaian kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020 — 131,2 Ha
- Persentase target pengurangan kawasan kumuh s.d. akhir tahun 2023 — 58,5%
- Realisasi pengurangan kawasan kumuh s.d tahun 2023 — 91,70 Ha
- Persentase realisasi pengurangan kawasan kumuh s/d. akhir tahun 2023 — 69,89%
- Persentase capaian kinerja tahun 2023 — 119,47%

Tabel 3.1.1.1

Rekapitulasi Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Basis SK Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020 Tahun 2020 :

No	Desa/Kelurahan	Luasan Kumuh	Capaian s/d Tahun 2022	Capaian s/d Tahun 2023	Capaian Komulatif s/d Tahun 2023	Sisa Luasan Kumuh s/d Tahun 2023
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f=d+e**	**g=c-f**
1	Kartoharjo	5,90	5,90	0	5,90	0
2	Banaran	4,04	4,04	0	4,04	0
3	Drenges	4,13	0,63	1,80	2,43	1,70
4	Ganungkidul	1,00	1,00	0	1,00	0
5	Balongpacul	11,00	0	6,00	6,00	5,00
6	Kedungdowo	9,00	2,34	6,66	9,00	0
7	Jatirejo	10,40	10,40	0	10,40	0
8	Gandu	2,00	0	0	0	2,00
9	Werungotok	4,00	2,50	0	2,50	1,50
10	Begadung	4,50	1,40	1,00	2,40	2,10
11	Kedondong	6,70	5,70	1,00	6,70	0
12	Balongrejo	9,80	5,90	1,90	7,80	2,00
13	Payaman	0,70	0,70	0,70	1,40	0,70
14	Warujayeng	30,83	19,83	3,00	22,83	8,00
15	Berbek	15,07	1,27	0	1,27	13,80
16	Sukorejo	0,82	0	0,82	0,82	0
17	Tanjungrejo	4,80	2,20	0	2,20	2,60
18	Candirejo	6,51	0	5,01	5,01	1,50
TOTAL		**131,20**	**63,81**	**27,89**	**91,70**	**39,50**

3. Realisasi **indikator sasaran persentase ketersediaan rumah layak huni** terealisasi sebesar 85,91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 93,21% dengan tingkat capaian sebesar 92,17%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit) dibagi dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit) di kali dengan 100%.

   Realisasi Capaian kinerja selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

   - Jumlah rumah s.d.akhir tahun 2023 329.269 unit
   - Persentase target rumah layak huni s.d. akhir tahun 2023 93,21%
   - Realisasi penanganan rumah layak huni pada tahun 2023 708 unit
   - Jumlah rumah layak Huni s.d. akhir tahun 2023 282.888 unit
   - Jumlah rumah tidak layak huni s.d. akhir tahun 2023 46.381 unit
   - Persentase capaian kinerja tahun 2023 92,17 %

Tabel 3.1.1.2

Rekapitulasi Data Rumah berbasis data trend Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Layak Huni s/d 2023	Jumlah Rumah s/d 2023	Jumlah rumah tidak layak huni s/d 2023
a	b	c	d	e=d-c
1	Nganjuk	18.676	19.846	1.170
2	Sawahan	8.843	12.418	3.575
3	Ngetos	9.092	11.594	2.502
4	Berbek	13.130	14.516	1.386
5	Loceret	18.821	21.891	3.070
6	Pace	15.678	17.693	2.015
7	Tanjunganom	29.546	33.998	4.452
8	Prambon	18.128	19.358	1.230
9	Ngronggot	32.198	33.363	1.165
10	Kertosono	13.477	14.604	1.127
11	Patianrowo	8.513	11.858	3.345
12	Baron	12.694	13.824	1.130
13	Gondang	10.291	15.140	4.849
14	Sukomoro	11.066	13.566	2.500
15	Bagor	18.905	20.111	1.206
16	Wilangan	9.387	11.696	2.309

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Layak Huni s/d 2023	Jumlah Rumah s/d 2023	Jumlah rumah tidak layak huni s/d 2023
a	b	c	d	e=d-c
17	Rejoso	20.642	21.944	1.302
18	Ngluyu	2.497	4.782	2.285
19	Lengkong	7.682	10.065	2.383
20	Jatikalen	3.622	7.002	3.380
TOTAL		**282.888**	**329.269**	**46.381**

Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 untuk mencapai indikator sasaran Persentase rumah layak huni adalah :

Tabel 3.1.1.3

Program BSPS (Pemerintah Pusat) sebanyak 393 unit

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN	USULAN	
			SK PENERIMA BANTUAN (Rumah)	REALISASI PEMBANGUNAN (Rumah)
SK BSPS TAHAP I			**283**	**283**
1	Bagor	Ngumpul	23	23
2	Jatikalen	Munung	28	28
3	Ngetos	Ngetos	20	20
4	Pace	Jampes	15	15
5	Pace	Jatigreges	15	15
6	Ngronggot	Dadapan	20	20
7	Prambon	Baleturi	19	19
8	Prambon	Rowoharjo	14	14
9	Rejoso	Mojorembun	24	24
10	Rejoso	Ngadiboyo	24	24
11	Rejoso	Sidokare	23	23
12	Wilangan	Ngadipiro	27	27
13	Wilangan	Sukoharjo	31	31
SK BSPS TAHAP III			**110**	**110**
1	Kertosono	Banaran	20	20
2	Kertosono	Nglawak	20	20
3	Nganjuk	Ploso	30	30
4	Ngetos	Klodan	20	20
5	Ngetos	Kepel	20	20
TOTAL			**393**	**393**

Tabel 3.1.1.4

Pemugaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) di dalam kawasan Kumuh

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN	USULAN	
			SK PENERIMA BANTUAN (Rumah)	REALISASI PEMBANGUNAN (Rumah)
1	Nganjuk	Kedungdowo	13	8
2	Nganjuk	Begadung	13	9
3	Bagor	Balongrejo	13	13
4	Kertosono	Drenges	13	13
TOTAL			**52**	**43**

Tabel 3.1.1.5

Pemugaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) di luar kawasan Kumuh

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN	USULAN	
			SK PENERIMA BANTUAN (Rumah)	REALISASI PEMBANGUNAN (Rumah)
1	Rejoso	Jatirejo	10	10
2	Ngluyu	Gampeng	10	10
3	Ngluyu	Ngluyu	15	14
4	Ngluyu	Bajang	10	7
5	Ngluyu	Sugihwaras	13	12
6	Lengkong	Sawahan	10	10
7	Jatikalen	Jatikalen	10	10
8	Jatikalen	Dawuhan	15	15
9	Nganjuk	Kramat	10	8
10	Kertosono	Juwono	10	9
11	Kertosono	Kutorejo	10	9
12	Kertosono	Tanjung	8	8
13	Pace	Pacekulon	6	4
14	Pace	Kepanjen	6	6
15	Pace	Sanan	6	5
16	Pace	Joho	10	10
17	Pace	Jatigreges	10	9
18	Gondang	Nglinggo	9	7
19	Sukomoro	Kedungsoko	10	8
20	Sukomoro	Ngrami	12	9
21	Ngronggot	Ngronggot	5	5
22	Ngronggot	Tanjungkalang	9	9
23	Baron	Kemlokolegi	5	4
24	Tanjunganom	Kedungombo	7	7

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN	USULAN	
			SK PENERIMA BANTUAN (Rumah)	REALISASI PEMBANGUNAN (Rumah)
25	Loceret	Sukorejo	10	8
TOTAL			**236**	**213**

Tabel 3.1.1.6

Pemugaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) P-APBD

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN	USULAN	
			SK PENERIMA BANTUAN (Rumah)	REALISASI PEMBANGUNAN (Rumah)
1	Ngluyu	Ngluyu	1	1
2	Ngluyu	Sugihwaras	1	1
3	Nganjuk	Kramat	2	2
4	Kertosono	Juwono	1	1
5	Kertosono	Kutorejo	14	14
6	Pace	Sanan	1	1
7	Pace	Jatigreges	1	1
8	Gondang	Nglinggo	2	2
9	Sukomoro	Kedungsoko	2	2
10	Baron	Kemlokolegi	1	1
11	Loceret	Sukorejo	2	2
12	Berbek	Bendungrejo	8	6
13	Nganjuk	Werungotok	17	16
14	Berbek	Tiripan	9	9
Total			**62**	**59**

4. Realisasi indikator sasaran persentase penyelesaian permasalahan pertanahan dalam Kabupaten terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

   Dengan rumus perhitungan yang di dapat yaitu jumlah permasalahan yang terselesaikan bidang pertanahan yang dilaporkan ke Dinas PRKPP dalam waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah permasalahan bidang pertanahan yang dilaporkan ke Dinas PRKPP dalam 1 tahun di kali dengan 100%.

   Penyelesaian Masalah Pertanahan yang di selesaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni Sengketa Tanah Garapan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota berupa 1 dokumen berita acara Penyelesaian Sanggahan oleh warga terdampak Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Kediri.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%) Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi (%) Capaian Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman		Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	56,16	59,41	62,37	80,05	80,15	83,9	87,04	87,18	46,57	63,13	78,28	85,27
2		Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	-	-	25	37,5	47,5	58,5	-	-	3,08	19,82	48,63	69,89
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	87,21	88,96	90,71	92,46	92,96	93,21	87,04	87,18	86,98	86,62	86,22	85,91
3		Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui adanya trend positif/selalu mengalami kenaikan capaian kinerja dari seluruh sasaran strategis maupun indikator kinerja, kecuali realisasi capaian pada indikator ketersediaan rumah layak huni realisasi capaian pada tahun 2023 masih di bawah tahun 2022. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran pada kegiatan tugas pembantuan dari APBN mengalami penurunan yang signifikan.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Periode Renstra

Tabel 3.1.3.1

Target Renstra

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman		Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	56,16	59,41	62,37	80,05	80,15	83,9
2		Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	0	-	25	37,5	47,5	58,5
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	87,21	88,96	90,71	92,46	92,96	93,21
3		Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	100

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk ditetapkan pada tahun 2018 untuk 5 tahun kedepan,sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023.

Namun, pada tahun 2020 ada perubahan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Sehingga perlu dilakukan reviuw terhadap Rencana Strategis dimaksud sehingga didapat target sebagaimana pada tabel 3.1.3.1.

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman		Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	83,9	85,27	101,63%
2		Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	58,5	69,89	119,47%
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	93,21	85,91	92,17%
3		Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100	100	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja tujuan/sasaran. Adapun perbandingan realisasi kinerja secara rinci Indikator kinerja tujuan/sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi indikator tujuan persentase peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman terealisasi sebesar 85,27% dari target yang telah ditetapkan sebesar 83,90% dengan tingkat kemajuan sebesar 101,63%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu penjumlahan dari persentase 3 (tiga) indikator sasaran kemudian dibagi 3 (tiga) dikali dengan 100%.
2. Realisasi indikator sasaran persentase pengurangan luasan kawasan kumuh terealisasi sebesar 69,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 58,5% dengan tingkat kemajuan sebesar 119,47%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu Jumlah luasan kawasan kumuh yang ditangani di kabupaten (Ha) dibagi dengan jumlah luasan total kawasan kumuh yang ditetapkan di kabupaten (Ha) dikali dengan 100%.

3. Realisasi indikator sasaran persentase ketersediaan rumah layak huni terealisasi sebesar 85,91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 93,12% dengan tingkat kemajuan sebesar 92,17%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit) dibagi dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit) di kali dengan 100%.

4. Realisasi indikator sasaran persentase penyelesaian permasalahan pertanahan dalam Kabupaten terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan tingkat kemajuan sebesar 100%.

   Dengan rumus perhitungan yang di dapat yaitu jumlah permasalahan yang terselesaikan bidang pertanahan yang dilaporkan ke Dinas PRKPP dalam waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah permasalahan bidang pertanahan yang dilaporkan ke Dinas PRKPP dalam 1 tahun di kali dengan 100%.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standar Nasional (Minimal dengan Regional/Propinsi/Kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman		Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	82,84	85,27
2		Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	69,00	69,89
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	62,4	85,91
3		Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti		100

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja tujuan/sasaran. Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional secara rinci Indikator kinerja tujuan/sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian realisasi kinerja pada indikator tujuan Peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nganjuk mencapai 85,27% diatas realisasi capaian kinerja Peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Tingkat Nasional (yang dirilis oleh ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR) yakni sebesar 82,84%.
2. Capaian realisasi kinerja pada indikator sasaran Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Nganjuk mencapai 69,89% diatas realisasi capaian kinerja Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Tingkat Nasional (yang dirilis oleh ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR) yakni sebesar 69,00%.
3. Capaian realisasi kinerja pada indikator sasaran Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Nganjuk mencapai 85,91% diatas realisasi capaian Kinerja Ketersediaan Rumah Layak Huni Tingkat Nasional (yang dirilis oleh ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR) yakni sebesar62,4%.
4. Sedangkan untuk capaian realisasi kinerja pada indikator sasaran permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Namun, capaian realisasi tersebut tidak bisa diperbandingkan karena tidak tersedianya data capaian realisasi permasalahan pertanahan tingkat nasional.

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	101,63%	Tercapai
2		1. Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	119,47%	Tercapai
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	92,17%	Tercapai
3		2.Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui 1 (satu) indikator tujuan yakni Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman dan 3 (tiga) indikator sasaran yakni Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh, Persentase

ketersediaan rumah layak huni dan Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti.

1. Capaian Kinerja pada indikator kinerja Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman sebesar 101,63%, sehingga analisis capaian kinerja tercapai dengan predikat sangat tinggi.
2. Capaian Kinerja pada indikator kinerja persentase pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 119,47%, sehingga analisis capaian kinerja tercapai dengan predikat sangat tinggi.

   Tercapainya target indikator kinerja persentase pengurangan luasan kawasan kumuh di atas rencana target salah satu sebagai faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Penanganan Kawasan Permukiman yaitu Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Nganjuk yang didanai oleh APBN. Selain itu, juga mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah melalui sumber dana APBD.

   Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

   1) Adanya program kegiatan setiap tahun yang dianggarkan oleh anggaran APBD tahun 2023 untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah desa/kelurahan pada kecamatan Nganjuk, sehingga target dalam penanganan kawasan kumuh sesuai dengan baseline dan target tahunan dapat tercapai walaupun masih perlu adanya beberapa kelurahan yang perlu ditingkatkan penanganan infrastruktur permukimannya;
   2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penanganan pencegahan kawasan kumuh bersama KOTAKU kabupaten Nganjuk (ditugaskan oleh kementrian PUPR) beserta kelurahan BKM/LKM;
   3) Masyarakat bersama-sama dengan OPD terkait membantu dalam pelaksanaan penanganan kumuh dan banjir dalam bentuk kerja bakti normalisasi saluran air/drainase;
3. Capaian Kinerja pada indkator kinerja Persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 92,17%, sehingga analisis capaian kinerja tercapai dengan predikat sangat tinggi.

   Namun dalam mencapai Persentase ketersediaan rumah layak huni masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

   1. Belum tumbuhnya kesadaran pada perusahaan-perusahaan di kabupaten Nganjuk untuk ikut berperan serta dalam rangka memberikan andil bantuan CSR kepada masyarakat untuk penanganan rumah layak huni sehingga hanya beberapa perusahaan saja yang berperan aktif.

4. Capaian Kinerja pada indkator kinerja Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti sebesar 100%, sehingga analisis capaian kinerja tercapai dengan predikat sangat tinggi.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	101,63%	91,99%	9,64%
2		Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	119,47%	99,34%	20,13%
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	92,17%	72,26%	19,91%
3		Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100%	69,10%	30,90%

Catatan:

Rumus Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja Tahun (n) - % Penyerapan Anggaran Tahun (n)

Berdasarkan tabel diatas, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk terdapat 1 (satu) indikator tujuan yakni Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman dan 3 (tiga) indikator sasaran yakni Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh, Persentase ketersediaan rumah layak huni dan Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti.

1 Capaian Kinerja pada indikator kinerja Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman sebesar 101,63%, dengan realisasi anggaran 91,99% sehingga tingkat efisiensi yang didapat sebesar 9,64%.

2 Capaian Kinerja pada indikator kinerja persentase pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 119,47%, dengan realisasi anggaran 99,34% sehingga tingkat efisiensi yang didapat sebesar 20,13%.

3 Capaian Kinerja pada indkator kinerja Persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 92,17%, dengan realisasi anggaran 72,26% sehingga tingkat efisiensi yang didapat sebesar 19,91%.

4 Capaian Kinerja pada indkator kinerja Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan realisasi anggaran 69,10% sehingga tingkat efisiensi yang didapat sebesar 30,90%.

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencaaiaan kinerja

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk		
2	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**99,34%**
			Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	100,00%
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	99,00%
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase pengurangan backlog rumah**	**96,00%**
			Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00%
			Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota	100,00%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
			Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00%
			Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Dokumen Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)	100,00%
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh**	**98,00%**
			Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	84,06%
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**95,02%**
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU Perumahan	100,00%
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan**	**0,00%**
			Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Dokumen Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perangcangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil	0,00%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan**	**63,12%**
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	100,00%
			Program Penatagunaan Tanah	**Persentase perencanaan penggunaan tanah**	**75,08%**
			Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	100,00%

Berdasarkan tabel Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk berikut adalah capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yakni:

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	97%	99,34%	102%

Dalam Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 97% pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 99,34%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 102%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan keluaran Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumukiman berupa 1 dokumen Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk.
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan keluaran Pesentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha berupa 43 unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki, 1 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan RTLH di Kawasan Kumuh dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar seluas 40 Ha.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengurangan backlog rumah	95%	96%	101%

Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja Persentase pengurangan backlog rumah yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 95% pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 96%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 101%. Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota berupa 2 Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana dan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus.
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan keluaran jumlah unit rumah pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota 95 unit rumah PSU Rumah Khusus di Desa Pandantoyo, Pisang, Sendangbumen, dan Sumberkepuh 75 unit dan Pemeliharaan Aset PSU di Rumah Khusus di desa Sendangbumen dan Sumberkepuh 20 unit.
3. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota berupa 1 dokumen Dokumen Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan sosial bagi korban bencana alam dan kebakaran di Kab. Nganjuk.
4. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan keluaran Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan berupa 2 dokumen Surat Rekomendasi Siteplan Perumahan yang sudah diterbitkan dan Notulen dan Berita Acara Pembahasan Siteplan Perumahan.
5. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) dengan keluaran Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) berupa 1 laporan Berita Acara Konsultasi PBG dan SLF.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perbaikan Rumah Dan Kawasan Permukiman Kumuh	95%	98%	103%

Dalam Pelaksanaan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator kinerja Persentase Perbaikan Rumah Dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 95% pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 98%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 103%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Unit Rumah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota berupa 268 unit rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha yang diperbaiki.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	100%	95%	95%

Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 100% pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 95%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 95%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan keluaran Jumlah Lokasi Penyelenggaraan PSU Perumahan berupa 1 dokumen Pendataan Aset PSU Perumahan Kabupaten Nganjuk, 3 laporan berupa Berita Acara Verifikasi : Griya Mastrip Regency, Bumi Jatirejo Residence dan Green Werungotok Residence, 15 lokasi pembangunan PSU Perumahan:
    1) Pembangunan PSU di Perumahan Puri Tanjung Persada (Lanjutan)
    2) Pembangunan PSU Gedung Serbaguna Perumahan Graha Mutiara
    3) Pembangunan PSU Jalan Menuju Perumahan Nuansa Kapas Asri
    4) Pembangunan PSU Perumahan Bumi Berlian Asri
    5) Pembangunan PSU Perumahan Bumi Jatirejo Residence

6) Pembangunan PSU Perumahan Ganung Asri
7) Pembangunan PSU Perumahan Graha Gading
8) Pembangunan PSU Perumahan Pondok Kencana
9) Pembangunan PSU Perumahan Puri Mangundikaraan
10) Pembangunan PSU Perumahan Puri Mangundikaran (Lanjutan)
11) Pembangunan PSU Perumahan Puri Tanjung Persada
12) Pembangunan PSU Perumahan Vilaa Candi Mas
13) Pembangunan PSU Perumahan Zahro in 2
14) Pembangunan RPTRA Perumahan Bumi Berlian Asri
15) Pembangunan RPTRA Perumahan Pondok Kencana (Lanjutan)

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Ditingkatkan	100%	0,00%	0,00%

Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Ditingkatkan yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 100% pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 0,00%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0,00%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil dengan keluaran Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil berupa 1 dokumen sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil. Namun Program/Kegiatan/Subkegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kewenangan penerbitannya sertifikasi,

kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman ada di pusat (Kementrian PUPR).

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentase Sengketa Tanah Garapan Yang Terselesaikan	100%	63,12%	63,12%

Dalam Pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator kinerja Presentase Sengketa Tanah Garapan Yang Terselesaikan yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 100% pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 63,12%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 63,12%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam (1) Satu Daerah Kabupaten/Kota berupa 1 dokumen berita acara Penyelesaian Sanggahan oleh warga terdampak Tol Kertosono – Kediri.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
7	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Perencanaan Penggunaan Tanah	95%	75%	79%

Dalam Pelaksanaan Program Penatagunaan Tanah dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan Penggunaan Tanah yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 95% pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 75%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 79%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah dokumen Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota berupa 2 dokumen Laporan Hasil Cruising Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan PPKH dan Laporan Akhir Penyelesaian Penguasaan.

3.1 Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk terdapat 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis yang terdapat pada Program-program di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dilihat sebagai berikut:

No	Program Kegiatan SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	**32.280.420.241**	**29.694.040.472**	**2.586.379.769**	**91,99%**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**6.499.808.051**	**5.677.509.321**	**822.298.730**	**87,35%**
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**37.539.000**	**37.463.000**	**76.000**	**99,80%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.965.000	4.957.000	8.000	99,84%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.995.000	4.986.000	9.000	99,82%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.980.000	4.950.000	30.000	99,40%
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	4.995.000	4.983.000	12.000	99,76%
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.995.000	4.983.000	12.000	99,76%
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.609.000	12.604.000	5.000	99,96%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.992.601.000**	**4.295.470.444**	**697.130.556**	**86,04%**
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.982.656.000	4.285.579.444	697.076.556	86,01%
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.965.000	4.926.000	39.000	99,21%
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.980.000	4.965.000	15.000	99,70%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**10.000.000**	**8.500.000**	**1.500.000**	**85,00%**
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	10.000.000	8.500.000	1.500.000	85,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**462.208.110**	**374.442.386**	**87.765.724**	**81,01%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.917.500	4.880.000	37.500	99,24%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.407.110	86.179.370	14.227.740	85,83%
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	40.000.000	38.947.750	1.052.250	97,37%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.800.000	4.868.000	932.000	83,93%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.990.000	2.573.315	2.416.685	51,57%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	251.093.500	232.048.901	19.044.599	92,42%

No	Program Kegiatan SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	55.000.000	54.820.050	179.950	99,67%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**222.189.553**	**217.270.000**	**4.919.553**	**97,79%**
	Pengadaan Mebel	102.596.450	100.500.000	2.096.450	97,96%
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	119.593.103	116.770.000	2.823.103	97,64%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**133.799.988**	**118.168.279**	**15.631.709**	**88,32%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	133.799.988	118.168.279	15.631.709	88,32%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**641.470.400**	**576.320.212**	**65.150.188**	**89,84%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.071.400	80.333.708	41.737.692	65,81%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	215.929.000	193.702.504	22.226.496	89,71%
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	53.470.000	52.705.000	765.000	98,57%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	250.000.000	249.579.000	421.000	99,83%
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**2.183.778.400**	**2.086.288.005**	**97.490.395**	**95,54%**
	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**184.500.000**	**178.897.865**	**5.602.135**	**96,96%**
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	117.000.000	111.397.865	5.602.135	95,21%
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus	67.500.000	67.500.000	-	100,00%
	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**1.768.478.400**	**1.756.491.660**	**11.986.740**	**99,32%**
	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.552.478.400	1.542.159.360	10.319.040	99,34%
	Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	216.000.000	214.332.300	1.667.700	99,23%
	Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**47.000.000**	**25.919.265**	**21.080.735**	**55,15%**
	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	47.000.000	25.919.265	21.080.735	55,15%
	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	**124.800.000**	**96.278.795**	**28.521.205**	**77,15%**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	60.800.000	50.600.155	10.199.845	83,22%
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian	64.000.000	45.678.640	18.321.360	71,37%

No	Program Kegiatan SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan				
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**59.000.000**	**28.700.420**	**30.299.580**	**48,64%**
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	59.000.000	28.700.420	30.299.580	48,64%
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**9.448.895.000**	**9.386.905.570**	**61.989.430**	**99,34%**
	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**17.900.000**	**11.879.220**	**6.020.780**	**66,36%**
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh	17.900.000	11.879.220	6.020.780	66,36%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**9.430.995.000**	**9.375.026.350**	**55.968.650**	**99,41%**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	752.500.000	752.500.000	-	100,00%
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	61.495.000	57.310.450	4.184.550	93,20%
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	8.617.000.000	8.565.215.900	51.784.100	99,40%
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**5.160.938.790**	**5.082.899.207**	**78.039.583**	**98,49%**
	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	**5.160.938.790**	**5.082.899.207**	**78.039.583**	**98,49%**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.160.938.790	5.082.899.207	78.039.583	98,49%
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**3.582.000.000**	**3.403.515.548**	**178.484.452**	**95,02%**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**3.582.000.000**	**3.403.515.548**	**178.484.452**	**95,02%**
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	106.000.000	74.720.870	31.279.130	70,49%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.176.000.000	3.147.740.060	28.259.940	99,11%
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	170.000.000	112.952.589	57.047.411	66,44%
	Verifikasi Dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang	130.000.000	68.102.029	61.897.971	52,39%
6	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
	Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana	**-**	**-**	**-**	**0,00%**

No	Program Kegiatan SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	-	-	-	0,00%
7	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**11.402.000**	**7.196.930**	**4.205.070**	**63,12%**
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**11.402.000**	**7.196.930**	**4.205.070**	**63,12%**
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.402.000	7.196.930	4.205.070	63,12%
8	**Program Penatagunaan Tanah**	**5.393.598.000**	**4.049.725.891**	**1.343.872.109**	**75,08%**
	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	**5.393.598.000**	**4.049.725.891**	**1.343.872.109**	**75,08%**
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	5.196.300.000	3.909.865.741	1.286.434.259	75,24%
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	197.298.000	139.860.150	57.437.850	70,89%

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh program di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan anatara indikator sasaran kinerja dengan indikator pada program.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat dinyatakan berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 32.280.420.241,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 29.694.040.472 atau 91,99%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas,

telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Lampiran-Lampiran

A. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS FRIHANNEDY,S.Pd,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI,SE,S.H.,M.M,M.BA
Jabatan : Plt. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 2023

Pihak Kedua Plt. BUPATI NGANJUK	Pihak Pertama Kepala Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI,SE,S.H.,M.M,M.BA	AGUS FRIHANNEDY,S.Pd,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19640901 198703 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan kumuh	58,5 %
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	93,21 %
2.	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase Permasalahan Pertanahan dalam Kabupaten yang ditindaklanjuti.	100 %

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	**7.522.262.146**	APBD
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	**1.589.139.500**	APBD
3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	**6.108.500.000**	APBD
4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp	**4.508.833.790**	APBD
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	**2.134.000.000**	APBD
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	**100.000.000**	APBD
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp	**25.000.000**	APBD
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp	**330.000.000**	APBD
	Total	Rp	**22.317.735.436**	

Nganjuk, 2023

Plt. BUPATI NGANJUK

Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI,SE,S.H.,M.M,M.BA

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419.
Telp./Fax. (0358) 330055. Email : prkppnganjuk@.gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 001 /K/411.315/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
b. Bahwa setelah adanya harmonisasi Rencana Strategis Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 10 JANUARI 2023

An. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK



AGUS FRIHANNEDY,S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NO. 188/ 007 /K/411.314/2023
TGL 10-01-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tugas Pokok : Membantu tugas membantu bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Fungsi :

1. Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh + Persentase ketersediaan rumah layak huni + Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti / 3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Renstra 2018-2023

An. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

DINAS PRKPP

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013

C. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**13.896.160.883**	**8.066.574.553**	**0**	**0**	**21.962.735.436**	**13.124.045.688**	**13.751.374.553**	**0**	**0**	**26.875.420.241**	**4.912.684.805**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.368.872.593**	**153.389.553**	**0**	**0**	**7.522.262.146**	**6.277.618.498**	**222.189.553**	**0**	**0**	**6.499.808.051**	**(1.022.454.095)**	
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**39.537.000**	**0**	**0**	**0**	**39.537.000**	**37.539.000**	**0**	**0**	**0**	**37.539.000**	**(1.998.000)**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.965.000	0	0	0	4.965.000	4.965.000	0	0	0	4.965.000	0	
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.995.000	0	0	0	4.995.000	4.995.000	0	0	0	4.995.000	0	
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.980.000	0	0	0	4.980.000	4.980.000	0	0	0	4.980.000	0	
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.995.000	0	0	0	4.995.000	4.995.000	0	0	0	4.995.000	0	
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.995.000	0	0	0	4.995.000	4.995.000	0	0	0	4.995.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		9.807.000	0	0	0	9.807.000	12.609.000	0	0	0	12.609.000	2.802.000	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.800.000	0	0	0	4.800.000	0	0	0	0	0	(4.800.000)	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.459.382.583**	**0**	**0**	**0**	**6.459.382.583**	**4.992.601.000**	**0**	**0**	**0**	**4.992.601.000**	**(1.466.781.583)**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		6.449.437.583	0	0	0	6.449.437.583	4.982.656.000	0	0	0	4.982.656.000	(1.466.781.583)	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.965.000	0	0	0	4.965.000	4.965.000	0	0	0	4.965.000	0	
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.980.000	0	0	0	4.980.000	4.980.000	0	0	0	4.980.000	0	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**314.128.610**	**0**	**0**	**0**	**314.128.610**	**462.208.110**	**0**	**0**	**0**	**462.208.110**	**148.079.500**	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.917.500	0	0	0	4.917.500	4.917.500	0	0	0	4.917.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		100.407.110	0	0	0	100.407.110	100.407.110	0	0	0	100.407.110	0	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		5.800.000	0	0	0	5.800.000	5.800.000	0	0	0	5.800.000	0	
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		4.990.000	0	0	0	4.990.000	4.990.000	0	0	0	4.990.000	0	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		153.014.000	0	0	0	153.014.000	251.093.500	0	0	0	251.093.500	98.079.500	
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		5.000.000	0	0	0	5.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	50.000.000	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**153.389.553**	**0**	**0**	**153.389.553**	**0**	**222.189.553**	**0**	**0**	**222.189.553**	**68.800.000**	
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		0	41.796.450	0	0	41.796.450	0	102.596.450	0	0	102.596.450	60.800.000	
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		0	111.593.103	0	0	111.593.103	0	119.593.103	0	0	119.593.103	8.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**80.000.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000.000**	**133.799.988**	**0**	**0**	**0**	**133.799.988**	**53.799.988**	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		80.000.000	0	0	0	80.000.000	133.799.988	0	0	0	133.799.988	53.799.988	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**465.824.400**	**0**	**0**	**0**	**465.824.400**	**641.470.400**	**0**	**0**	**0**	**641.470.400**	**175.646.000**	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		118.071.400	0	0	0	118.071.400	122.071.400	0	0	0	122.071.400	4.000.000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		210.833.000	0	0	0	210.833.000	215.929.000	0	0	0	215.929.000	5.096.000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		36.920.000	0	0	0	36.920.000	53.470.000	0	0	0	53.470.000	16.550.000	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul		100.000.000	0	0	0	100.000.000	250.000.000	0	0	0	250.000.000	150.000.000	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**509.139.500**	**1.080.000.000**	**0**	**0**	**1.589.139.500**	**455.778.400**	**1.728.000.000**	**0**	**0**	**2.183.778.400**	**594.638.900**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**184.500.000**	**0**	**0**	**0**	**184.500.000**	**34.500.000**	
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.000.000	0	0	0	150.000.000	117.000.000	0	0	0	117.000.000	(33.000.000)	
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	67.500.000	0	0	0	67.500.000	67.500.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**0**	**1.080.000.000**	**0**	**0**	**1.080.000.000**	**40.478.400**	**1.728.000.000**	**0**	**0**	**1.768.478.400**	**688.478.400**	
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nganjuk, Ngetos, Ngetos; Kab. Nganjuk, Berbek, Sendangbumen; Kab. Nganjuk, Kertosono, Pandantoyo; Kab. Nganjuk, Patianrowo, Pisang; Kab. Nganjuk, Lengkong, Sumberkepuh		0	864.000.000	0	0	864.000.000	40.478.400	1.512.000.000	0	0	1.552.478.400	688.478.400	
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	216.000.000	0	0	216.000.000	0	216.000.000	0	0	216.000.000	0	
1	**04**	**02**	**2.04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				**58.000.000**	**0**	**0**	**0**	**58.000.000**	**47.000.000**	**0**	**0**	**0**	**47.000.000**	**(11.000.000)**	
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58.000.000	0	0	0	58.000.000	47.000.000	0	0	0	47.000.000	(11.000.000)	
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**				**201.139.500**	**0**	**0**	**0**	**201.139.500**	**124.800.000**	**0**	**0**	**0**	**124.800.000**	**(76.339.500)**	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000	0	0	0	100.000.000	60.800.000	0	0	0	60.800.000	(39.200.000)	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			101.139.500	0	0	0	101.139.500	64.000.000	0	0	0	64.000.000	(37.139.500)	
1	**04**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**				**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**59.000.000**	**0**	**0**	**0**	**59.000.000**	**(41.000.000)**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000	0	0	0	100.000.000	59.000.000	0	0	0	59.000.000	(41.000.000)	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				**1.010.060.000**	**5.098.440.000**	**0**	**0**	**6.108.500.000**	**830.455.000**	**8.618.440.000**	**0**	**0**	**9.448.895.000**	**3.340.395.000**	
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**				**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**17.900.000**	**0**	**0**	**0**	**17.900.000**	**(7.100.000)**	
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	17.900.000	0	0	0	17.900.000	(7.100.000)	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**				**985.060.000**	**5.098.440.000**	**0**	**0**	**6.083.500.000**	**812.555.000**	**8.618.440.000**	**0**	**0**	**9.430.995.000**	**3.347.495.000**	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			910.000.000	0	0	0	910.000.000	752.500.000	0	0	0	752.500.000	(157.500.000)	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75.060.000	1.440.000	0	0	76.500.000	60.055.000	1.440.000	0	0	61.495.000	(15.005.000)	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5.097.000.000	0	0	5.097.000.000	0	8.617.000.000	0	0	8.617.000.000	3.520.000.000	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				**4.502.088.790**	**6.745.000**	**0**	**0**	**4.508.833.790**	**5.154.193.790**	**6.745.000**	**0**	**0**	**5.160.938.790**	**652.105.000**	
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**				**4.502.088.790**	**6.745.000**	**0**	**0**	**4.508.833.790**	**5.154.193.790**	**6.745.000**	**0**	**0**	**5.160.938.790**	**652.105.000**	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.502.088.790	6.745.000	0	0	4.508.833.790	5.154.193.790	6.745.000	0	0	5.160.938.790	652.105.000	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				**406.000.000**	**1.728.000.000**	**0**	**0**	**2.134.000.000**	**406.000.000**	**3.176.000.000**	**0**	**0**	**3.582.000.000**	**1.448.000.000**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				**406.000.000**	**1.728.000.000**	**0**	**0**	**2.134.000.000**	**406.000.000**	**3.176.000.000**	**0**	**0**	**3.582.000.000**	**1.448.000.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106.000.000	0	0	0	106.000.000	106.000.000	0	0	0	106.000.000	0	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Loceret, Tanjungrejo; Kab. Nganjuk, Loceret, Sombron; Kab. Nganjuk, Loceret, Candirejo; Kab. Nganjuk, Kertosono, Pandantoyo; Kab. Nganjuk, Tanjunganom, Kedungombo; Kab. Nganjuk, Sukomoro, Kapas; Kab. Nganjuk, Nganjuk, Kramat; Kab. Nganjuk, Nganjuk, Ganung Kidul; Kab. Nganjuk, Nganjuk, Werungotok; Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran; Kab. Nganjuk, Nganjuk, Begadung		0	1.728.000.000	0	0	1.728.000.000	0	3.176.000.000	0	0	3.176.000.000	1.448.000.000	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.000.000	0	0	0	150.000.000	170.000.000	0	0	0	170.000.000	20.000.000	
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.000.000	0	0	0	150.000.000	130.000.000	0	0	0	130.000.000	(20.000.000)	
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(100.000.000)**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**				**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(100.000.000)**	
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	(100.000.000)	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**354.093.000**	**907.000**	**0**	**0**	**355.000.000**	**5.404.093.000**	**907.000**	**0**	**0**	**5.405.000.000**	**5.050.000.000**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**				**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**11.402.000**	**0**	**0**	**0**	**11.402.000**	**(13.598.000)**	
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**11.402.000**	**0**	**0**	**0**	**11.402.000**	**(13.598.000)**	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25.000.000	0	0	0	25.000.000	11.402.000	0	0	0	11.402.000	(13.598.000)	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**				**329.093.000**	**907.000**	**0**	**0**	**330.000.000**	**5.392.691.000**	**907.000**	**0**	**0**	**5.393.598.000**	**5.063.598.000**	
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**				**329.093.000**	**907.000**	**0**	**0**	**330.000.000**	**5.392.691.000**	**907.000**	**0**	**0**	**5.393.598.000**	**5.063.598.000**	
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			99.093.000	907.000	0	0	100.000.000	5.195.393.000	907.000	0	0	5.196.300.000	5.096.300.000	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			230.000.000	0	0	0	230.000.000	197.298.000	0	0	0	197.298.000	(32.702.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.050.151.876
Februari	Rp1.159.110.003
Maret	Rp10.356.727.742
April	Rp4.642.110.414
Mei	Rp497.362.855
Juni	Rp1.445.925.129
Juli	Rp186.211.740
Agustus	Rp338.367.390
September	Rp273.719.953
Oktober	Rp10.919.856.886
November	Rp57.559.867
Desember	Rp1.353.316.386
Jumlah	Rp32.280.420.241

Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

AGUS FRIHANNEDY, S.Pd, M.Si

NIP: 196409011987031013

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

Format 3

Formulir Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
															I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	1	04	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**90%**	**8.270.665.140**	**79%**	**6.680.969.730**	**90%**	**6.499.808.051**	**12,74%**	**920.403.838**	**25,32%**	**1.828.900.940**	**17,03%**	**1.230.226.588**	**23,51%**	**1.697.977.955**	**78,61%**	**5.677.509.321**	**87,3%**	**87,3%**	**158%**	**12.358.479.051**	**175%**	**149%**	**DPRKPP**
		1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**8 dokumen**	**45.646.000**	**9 dokumen**	**37.539.000**	**0 dokumen**	**-**	**6 dokumen**	**7.562.000**	**6 dokumen**	**21.639.000**	**6 dokumen**	**8.262.000**	**8 dokumen**	**37.463.000**	**88,89%**	**99,80%**	**8 dokumen**	**83.109.000**	**-**	**-**	**DPRKPP**
	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	1	04	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			4 dokumen	8.776.000	4 dokumen	4.965.000	0 dokumen	-	2 dokumen	1.672.000	2 dokumen	2.580.000	2 dokumen	705.000	4 dokumen	4.957.000	100%	99,84%	4 dokumen	13.733.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	7.896.000	1 dokumen	4.995.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	4.986.000	1 dokumen	-	1 dokumen	4.986.000	100%	99,82%	1 dokumen	12.882.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumPerubahan RKA-SKPD			0 dokumen	-	1 dokumen	4.980.000	0 dokumen	-	1 dokumen	786.000	1 dokumen	4.164.000	1 dokumen	-	1 dokumen	4.950.000	100%	99,40%	1 dokumen	4.950.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			1 dokumen	7.880.000	1 dokumen	4.995.000	0 dokumen	-	1 dokumen	768.000	1 dokumen	2.916.000	1 dokumen	1.299.000	1 dokumen	4.983.000	100%	100%	1 dokumen	12.863.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0 dokumen	-	1 dokumen	4.995.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	1.536.000	1 dokumen	3.447.000	0 dokumen	4.983.000	0%	100%	1 dokumen	4.983.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			2 laporan	21.094.000	2 laporan	12.609.000	0 laporan	-	2 laporan	4.336.000	2 laporan	5.457.000	2 laporan	2.811.000	2 laporan	12.604.000	100%	99,96%	1 dokumen	33.698.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			0 dokumen	-	0 dokumen	0	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	0	0%	0%	1 dokumen	0	-	-	DPRKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
															I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**			**6 dokumen**	**5.692.925.079**	**6 Dokumen**	**4.992.601.000**	**1 Dokumen**	**634.406.213**	**3 Dokumen**	**1.663.890.676**	**3 Dokumen**	**934.147.280**	**3 Dokumen**	**1.063.026.275**	**6 Dokumen**	**4.295.470.444**	**100%**	**86%**	**7 Dokumen**	**9.988.395.523**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			50 orang	5.677.975.079	54 Orang/bulan	4.982.656.000	38 orang	634.406.213	35 Orang/bulan	1.658.964.676	35 Orang/bulan	929.182.280	35 Orang/bulan	1.063.026.275	35 orang	4.285.579.444	100%	86%	85 orang	9.963.554.523	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			3 laporan	7.176.000	3 Laporan	4.965.000	0 Laporan	-	3 Laporan	4.926.000	3 Laporan	0	3 Laporan	-	3 Laporan	4.926.000	100%	99,21%	3 Laporan	12.102.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3 dokumen	7.774.000	3 dokumen	4.980.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	3 dokumen	4.965.000	3 dokumen	-	3 dokumen	4.965.000	0%	99,70%	3 dokumen	12.739.000	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi**			**50 orang**	**9.600.000**	**54 orang**	**10.000.000**	**38 orang**	**1.500.000**	**35 orang**	**1.200.000**	**35 orang**	**2.200.000**	**35 orang**	**3.600.000**	**35 orang**	**8.500.000**	**65%**	**85%**	**88 orang**	**18.100.000**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			50 orang	9.600.000	54 orang	10.000.000	38 orang	1.500.000	35 orang	1.200.000	35 orang	2.200.000	35 orang	3.600.000	35 orang	8.500.000	100%	85%	88 orang	18.100.000	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi**			**3 paket**	**383.217.479**	**3 paket**	**462.208.110**	**1 paket**	**54.073.707**	**1 paket**	**50.252.850**	**1 paket**	**88.000.934**	**1 paket**	**231.989.895**	**3 paket**	**424.317.386**	**100%**	**91,80%**	**4 paket**	**807.534.865**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	3.430.000	6 paket	4.917.500	6 paket	815.000	6 paket	1.829.000	6 paket	0	6 paket	2.236.000	6 paket	4.880.000	100%	99%	2 paket	8.310.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 paket	140.165.695	3 paket	100.407.110	1 paket	14.858.050	1 paket	14.429.100	1 paket	16.311.350	1 paket	40.580.870	3 paket	86.179.370	100%	86%	2 paket	226.345.065	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	30.774.920	1 paket	40.000.000	1 paket	4.627.500	1 paket	16.355.250	1 paket	7.672.250	1 paket	10.292.750	1 paket	38.947.750	100%	97%	2 paket	69.722.670	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 dokumen	4.380.000	4 dokumen	5.800.000	1 dokumen	708.000	1 dokumen	1.104.000	1 dokumen	1.104.000	1 dokumen	1.952.000	3 dokumen	4.868.000	75%	84%	4 dokumen	9.248.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			3 laporan	1.887.875	3 laporan	4.990.000	1 laporan	680.915	1 laporan	455.000	1 laporan	613.545	1 laporan	823.855	3 laporan	2.573.315	100%	52%	4 laporan	4.461.190	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 laporan	199.248.989	12 laporan	251.093.500	3 laporan	27.439.192	3 laporan	16.080.500	3 laporan	62.299.789	3 laporan	126.229.420	9 laporan	232.048.901	75%	92%	15 laporan	431.297.890	-	-	DPRKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
															I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			1 dokumen	3.330.000	3 dokumen	55.000.000	3 dokumen	4.945.050	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	49.875.000	3 dokumen	54.820.050	100%	100%	4 dokumen	58.150.050	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**			**48 unit**	**66.798.500**	**20 unit**	**222.189.553**	**20 unit**	**149.320.000**	**0 unit**	**-**	**0 unit**	**-**	**0 unit**	**67.950.000**	**20 unit**	**217.270.000**	**100%**	**98%**	**68 unit**	**284.068.500**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			42 unit	34.798.500	4 unit	102.596.450	4 unit	40.500.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	60.000.000	4 unit	100.500.000	100%	98%	46 unit	135.298.500	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			6 Unit	32.000.000	16 Unit	119.593.103	16 Unit	108.820.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	7.950.000	16 Unit	116.770.000	100%	98%	22 Unit	148.770.000	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**60,41%**	**80.778.709**	**12 laporan**	**133.799.988**	**3 laporan**	**22.644.158**	**3 laporan**	**32.148.526**	**3 laporan**	**19.387.305**	**3 laporan**	**43.988.290**	**9 laporan**	**118.168.279**	**75%**	**88%**	**3 Laporan**	**198.946.988**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	80.778.709	12 laporan	133.799.988	3 laporan	22.644.158	3 laporan	32.148.526	3 laporan	19.387.305	3 laporan	43.988.290	9 laporan	118.168.279	75%	88%	3 Laporan	198.946.988	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**9 unit**	**402.003.963**	**9 unit**	**641.470.400**	**9 unit**	**58.459.760**	**9 unit**	**73.846.888**	**9 unit**	**164.852.069**	**9 unit**	**279.161.495**	**9 unit**	**576.320.212**	**100%**	**90%**	**18 unit**	**978.324.175**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	87.575.856	1 unit	122.071.400	1 unit	13.915.242	1 unit	22.988.131	1 unit	15.751.137	1 unit	27.679.198	1 unit	80.333.708	100%	66%	2 unit	167.909.564	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 unit	189.831.107	15 unit	215.929.000	3 unit	31.949.518	3 unit	45.818.757	3 unit	44.463.432	3 unit	71.470.797	9 unit	193.702.504	60%	90%	6 unit	383.533.611	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara			4 unit	29.740.000	4 unit	53.470.000	4 unit	12.595.000	4 unit	5.040.000	4 unit	4.837.500	4 unit	30.232.500	4 unit	52.705.000	100%	99%	8 unit	82.445.000	-	-	DPRKPP
		1	04	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharaan/rehabilitasi			1 unit	94.857.000	2 unit	250.000.000	0 unit	-		-	2 unit	99.800.000	2 unit	149.779.000	2 unit	249.579.000	100%	99,83%	1 unit	344.436.000	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase pengurangan backlog rumah**	**95%**	**1.675.000.000**	**87,01%**	**7.362.823.282**	**95%**	**2.135.778.400**	**0,35%**	**7.950.000**	**20,35%**	**457.436.130**	**32,15%**	**722.807.955**	**38,67%**	**869.393.500**	**91,52%**	**2.057.587.585**	**96%**	**96%**	**1,79**	**9.420.410.867**	**188%**	**562%**	**DPRKPP**
		1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**4 dokumen**	**23.643.000**	**1 dokumen**	**184.500.000**	**1 dokumen**	**300.000**	**1 dokumen**	**70.194.265**	**1 dokumen**	**6.355.500**	**1 dokumen**	**102.048.100**	**1 dokumen**	**178.897.865**	**100%**	**97%**	**5 dokumen**	**202.540.865**	**-**	**-**	**DPRKPP**

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
															I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	04	02	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah			1 dokumen	23.643.000	1 dokumen	117.000.000	1 dokumen	300.000	1 dokumen	2.694.265	1 dokumen	6.355.500	1 dokumen	102.048.100	1 dokumen	111.397.865	100%	95%	2 dokumen	135.040.865	-	-	DPRKPP
		1	04	02	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus					1 dokumen	67.500.000	0 dokumen	-	1 dokumen	67.500.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	67.500.000	100%	100%	2 dokumen	67.500.000	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**jumlah unit rumah pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota**			**8 paket**	**7.264.971.469**	**95 unit rumah**	**1.768.478.400**	**0**	**1.200.000**	**20 Unit rumah**	**381.533.360**	**48 Unit Rumah**	**702.797.300**	**27 Unit Rumah**	**670.961.000**	**95 Unit rumah**	**1.756.491.660**	**100%**	**99%**	**8 paket**	**9.021.463.129**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	02	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten/ kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/ kota yang terbangun			8 paket	7.034.460.269	75 unit rumah	1.552.478.400	0	1.200.000	10 unit rumah	373.597.360	38 unit rumah	502.100.000	27 unit rumah	665.262.000	75 unit rumah	1.542.159.360	100%	99%	8 paket	8.576.619.629	-	-	DPRKPP
		1	04	02	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program kabupaten/kota yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan			1 paket	230.511.200	20 unit rumah	216.000.000	0	-	10 unit rumah	7.936.000	10 unit rumah	200.697.300	20 unit rumah	5.699.000	20 unit rumah	214.332.300	100%	99%	1 paket	444.843.500	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**02**	**2.04**		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			**0 dokumen**	**0**	**1 dokumen**	**58.000.000**	**1 dokumen**	**1.530.000**	**1 dokumen**	**2.471.265**	**1 dokumen**	**7.186.000**	**1 dokumen**	**14.732.000**	**1 Dokumen**	**25.919.265**	**100%**	**45%**	**1 dokumen**	**25.919.265**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	02	2.04	1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			0 dokumen	-	1 dokumen	58.000.000	1 dokumen	1.530.000	1 dokumen	2.471.265	1 dokumen	7.186.000	1 dokumen	14.732.000	1 Dokumen	25.919.265	100%	45%	1 dokumen	25.919.265	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**			**15 dokumen**	**74.208.813**	**2 dokumen**	**124.800.000**	**1 dokumen**	**4.920.000**	**1 dokumen**	**3.237.240**	**1 dokumen**	**6.469.155**	**1 dokumen**	**81.652.400**	**2 dokumen**	**96.278.795**	**100%**	**77%**	**17 dokumen**	**170.487.608**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	02	2.06	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik			5 dokumen	47.545.650	6 dokumen	60.800.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	6 dokumen	2.384.155	6 dokumen	48.216.000	6 dokumen	50.600.155	100,00%	83,22%	5 dokumen	**98.145.805**	**-**	**-**	DPRKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
															I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	04	02	2.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			10 laporan	26.663.163	1 laporan	64.000.000	1 laporan	4.920.000	1 laporan	3.237.240	1 laporan	4.085.000	1 laporan	33.436.400	1 laporan	45.678.640	100%	71%	11 laporan	72.341.803	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**			**0 dokumen**	**0**	**1 dokumen**	**59.000.000**	**0 dokumen**	**-**	**0 dokumen**	**-**	**1 dokumen**	**5.834.820**	**1 dokumen**	**22.865.600**	**1 dokumen**	**28.700.420**	**100,00%**	**48,64%**	**0 dokumen**	**28.700.420**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	02	2.07		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			0 lapoaran	-	1 laporan	59.000.000	0 laporan	-	0 laporan	-	1 laporan	5.834.820	1 laporan	22.865.600	1 laporan	28.700.420	100,00%	**48,64%**	0 laporan	**28.700.420**	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**97%**	**3.425.000.000**	**82,81%**	**1.091.728.148**	**97%**	**9.448.895.000**	**9,84%**	**958.793.140**	**24,41%**	**2.377.928.410**	**24,63%**	**2.399.311.420**	**37,48%**	**3.650.872.600**	**96,36%**	**9.386.905.570**	**99,34%**	**99%**	**1,7917363**	**10.478.633.718**	**185%**	**306%**	**DPRKPP**
		1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumukiman**			**0 dokumen**	**0**	**1 dokumen**	**17.900.000**	**1 dokumen**	**3.857.320**	**1 dokumen**	**2.475.000**	**0 dokumen**	**-**	**1 dokumen**	**5.546.900**	**1 dokumen**	**11.879.220**	**100%**	**66%**	**1 laporan**	**11.879.220**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	03	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			0 laporan	-	1 laporan	17.900.000	1 laporan	3.857.320	1 laporan	2.475.000	0 laporan	-	1 laporan	5.546.900	1 laporan	11.879.220	100%	66%	1 laporan	11.879.220	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Pesentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**			**86,22%**	**1.091.728.148**	**97%**	**9.430.995.000**	**9,82%**	**954.935.820**	**24,43%**	**2.375.453.410**	**24,68%**	**2.399.311.420**	**37,49%**	**3.645.325.700**	**96,42%**	**9.375.026.350**	**99%**	**99%**	**182,64%**	**10.466.754.498**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki			25 unit rumah	405.000.000	43 unit rumah	752.500.000	43 unit rumah	752.500.000	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	43 unit rumah	752.500.000	57,33%	100%	87 unit rumah	1.157.500.000	-	-	DPRKPP
		1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh			1 laporan	59.915.526	1 laporan	61.495.000	1 laporan	11.093.320	1 laporan	24.148.000	1 laporan	14.742.130	1 laporan	7.327.000	1 laporan	57.310.450	100%	93%	2 laporan	117.225.976	-	-	DPRKPP
		1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar			15 Ha	626.812.622	40 Ha	8.617.000.000	26 Ha	191.342.500	26 Ha	2.351.305.410	28 Ha	2.384.569.290	40 Ha	3.637.998.700	40 Ha	8.565.215.900	80%	99%	41 Ha	9.192.028.522	-	-	DPRKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
															I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh**	**95%**	**16.300.000.000**	**91,29%**	**5.555.814.867**	**95%**	**5.160.938.790**	**67,20%**	**3.650.946.651**	**4,86%**	**264.213.722**	**1,38%**	**74.892.402**	**20,12%**	**1.092.846.432**	**93,56%**	**5.082.899.207**	**98%**	**98%**	**1,85**	**10.638.714.074**	**195%**	**65%**	**DPRKPP**
		1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Unit Rumah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota**			**293 unit rumah**	**5.555.814.867**	**268 unit rumah**	**5.160.938.790**	**203 unit rumah**	**3.650.946.651**	**213 unit rumah**	**264.213.722**	**213 unit rumah**	**74.892.402**	**268 unit rumah**	**1.092.846.432**	**268 unit rumah**	**5.082.899.207**	**84,06%**	**98%**	**496 unit rumah**	**10.638.714.074**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			293 unit rumah	5.555.814.867	268 unit rumah	5.160.938.790	203 unit rumah	3.650.946.651	213 unit rumah	264.213.722	213 unit rumah	74.892.402	268 unit rumah	1.092.846.432	268 unit rumah	5.082.899.207	85%	98%	496 unit rumah	10.638.714.074	-	-	DPRKPP
		1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**100%**	**2.475.000.000**	**97,58%**	**1.432.687.421**	**100%**	**3.582.000.000**	**0,25%**	**8.790.322**	**31,88%**	**1.142.120.322**	**18,15%**	**650.291.102**	**44,73%**	**1.602.313.802**	**95,02%**	**3.403.515.548**	**95%**	**95%**	**193%**	**4.836.202.969**	**193%**	**195%**	**DPRKPP**
		1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Lokasi Penyelenggaraan PSU Perumahan**			**97,58%**	**1.432.687.421**	**8 Lokasi**	**3.582.000.000**	**0 lokasi**	**8.790.322**	**8 Lokasi**	**1.142.120.322**	**8 Lokasi**	**650.291.102**	**8 Lokasi**	**1.602.313.802**	**8 Lokasi**	**3.403.515.548**	**100%**	**95%**	**8 lokasi**	**4.836.202.969**	**0%**	**0%**	**DPRKPP**
		1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	JJumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			1 Dokumen	103.341.650	1 Dokumen	106.000.000	0	-	1 Dokumen	7.140.000	1 Dokumen	8.771.570	1 Dokumen	58.809.300	1 Dokumen	74.720.870	100%	70%	1 dokumen	**178.062.520**	**-**	**-**	DPRKPP
		1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	umlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			5 Lokasi	1.223.794.436	13 Lokasi	3.176.000.000	0	-	8 Lokasi	1.122.142.000	8 Lokasi	567.067.060	5 lokasi	1.458.531.000	13 Lokasi	3.147.740.060	100%	99%	13 lokasi	4.371.534.496	**-**	**-**	DPRKPP
		1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana,dan utilitas umum perumahan			3 laporan	105.551.335	1 laporan	170.000.000	1 laporan	4.395.161	1 laporan	6.943.161	1 laporan	57.763.926	1 laporan	43.850.341	1 laporan	112.952.589	100%	66%	4 laporan	218.503.924	**-**	**-**	DPRKPP
		1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			0 laporan	-	5 laporan	130.000.000	1 laporan	4.395.161	1 laporan	5.895.161	1 laporan	16.688.546	2 laporan	41.123.161	5 laporan	68.102.029	80%	52%	1 laporan	68.102.029	**-**	**-**	DPRKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
															I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan**	**100%**	**25.000.000**	**60,42%**	**8.284.650**	**100%**	**100.000.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**0%**	**0,60**	**8.284.650**	**60%**	**33%**	**DPRKPP**
		1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**			**5 laporan**	**8.284.650**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**0 dokumen**	**-**	**0 dokumen**	**-**	**0 dokumen**	**-**	**0 dokumen**	**-**	**0 dokumen**	**-**	**0%**	**0%**	**5 laporan**	**8.284.650**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil			5 laporan	8.284.650	1 laporan	100.000.000	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	0%	0%	5 laporan	8.284.650	-	-	DPRKPP
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																								
		1	**04**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Presentase Sengketa Tanah Garapan yang Terselesaikan**	**100%**	**50.000.000**	**71,32%**	**839.832.185**	**100%**	**11.402.000**	**0%**	**-**		**-**	**6,86%**	**782.430**	**56,26%**	**6.414.500**	**63%**	**7.196.930**	**63,12%**	**63,12%**	**134,44%**	**847.029.115**	**134%**	**1694%**	**DPRKPP**
		1	**04**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**umlah Dokumen Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam (1) Satu Daerah Kabupaten/Kota**			**3 dokumen**	**839.832.185**	**1 dokumen**	**11.402.000**	**0 dokumen**	**-**		**-**	**1 dokumen**	**782.430**	**1 dokumen**	**6.414.500**	**1 dokumen**	**7.196.930**	**100,00%**	**63,12%**	**3 dokumen**	**839.832.185**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		1	04	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	839.832.185	1 Berita Acara	11.402.000	0 Berita acara	-		-	1 Berita acara	782.430	1 Berita acara	6.414.500	1 Berita acara	7.196.930	100,00%	63,12%	1 Berita Acara	839.832.185	-	-	DPRKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
															I		II		III		IV									
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase perencanaan penggunaan tanah**	**95%**	**50.000.000**			**95%**	**5.393.598.000**	**0,87%**	**49.485.575**	**0,35%**	**19.597.130**	**3,98%**	**226.056.200**	**66,13%**	**3.754.586.986**	**71,33%**	**4.049.725.891**	**75%**	**75%**	**71,33%**	**4.049.725.891**	**75%**	**8099%**	**DPRKPP**
		2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota**					**2 Dokumen**	**5.393.598.000**	**2 Dokumen**	**49.485.575**	**2 Dokumen**	**19.597.130**	**2 Dokumen**	**226.056.200**	**2 Dokumen**	**3.754.586.986**	**2 Dokumen**	**4.049.725.891**	**100%**	**75%**	**2 dokumen**	**4.049.725.891**	**-**	**-**	**DPRKPP**
		2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota					1 laporan	5.196.300.000	1 laporan	42.370.575	1 laporan	14.907.030	1 laporan	120.692.400	1 laporan	3.731.895.736	1 laporan	3.909.865.741	100%	75%	1 laporan	3.909.865.741	-	-	DPRKPP
		2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					1 dokumen	197.298.000	1 dokumen	7.115.000	1 dokumen	4.690.100	1 dokumen	105.363.800	1 dokumen	22.691.250	1 Dokumen	139.860.150	100%	71%	1 dokumen	139.860.150	-	-	DPRKPP
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		**87,82%**	**87,82%**	**DINAS PRKPP**			
																							Pedikat kinerja		Tinggi		**DINAS PRKPP**			

Catatan : *)

Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

Nganjuk, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PRKPP NGANJUK

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640901 198703 1 013